Prosiding Seminar Hasil
KKN, Vol 3 No 1 2026
E ISSN 3030-8895
Published by Research and Community Development Center

PENGEMBANGAN WEBSITE DESA KUPANG SEBAGAI UPAYA DIGITALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Yanuartha Eka Saputra[1], Azzumardi Mubarok Romadhoni[2], Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani[3]

Correspondence
Universitas Muhammadiyah Gresik
Email : ahyanyusuf@umg.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pelayanan publik menuju sistem berbasis digital yang lebih efisien dan transparan. Di tingkat desa, pelayanan administrasi masih banyak dilakukan secara konvensional sehingga menimbulkan kesenjangan informasi dan menyebabkan kunjungan berulang masyarakat akibat ketidaklengkapan dokumen. Kegiatan ini bertujuan menganalisis pengembangan website Desa Kupang sebagai upaya digitalisasi pelayanan administrasi dalam perspektif administrasi publik dan e-government. Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, analisis kebutuhan, pengembangan sistem berbasis WordPress, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hasil Kegiatan menunjukkan bahwa website desa mampu meningkatkan aksesibilitas informasi persyaratan administrasi, mengurangi kunjungan berulang, serta memperkuat transparansi pemerintahan desa. Implementasi ini berada pada tahap penyediaan informasi dalam model e-government . Digitalisasi melalui website desa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan literasi digital masyarakat, meskipun masih memerlukan pengembangan menuju layanan daring terintegrasi.

Keyword: Digitalisasi Pelayanan, Website Desa, E-Government, Administrasi Publik.

Abstract

Developments in information technology are driving the transformation of public services toward a more efficient and transparent digital-based system. At the village level, administrative services are still largely conducted conventionally, creating information gaps and leading to repeat visits by the public due to incomplete documents. This study aims to analyze the development of the Kupang Village website as an effort to digitize administrative services from the perspective of public administration and e-government. The study used a descriptive qualitative approach through observation, interviews, needs analysis, WordPress-based system development, and community outreach. The results show that the village website is able to improve the accessibility of information on administrative requirements, reduce repeat visits, and strengthen the transparency of village government. This implementation is at the information provision stage within the e-government model. Digitization through the village website is a strategic step in increasing efficiency and digital literacy for the community, although it still requires development towards integrated online services.

Keyword: Service Digitalization, Village Website, E-Government, Public

Administration.

PENDAHULUAN

Kemajuan perusahaan maupun organisai sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi, terlebih lagi pada bidang komputer dan komunikasi. Hal ini dikarenakan pengolahan informasi dan data yg sangat banyak tidak mungkin dilakukan dengan cara manual, sehingga sangat diperlukan alat bantu yg memiliki kecepatan tinggi supaya lebih efisien. Perangkat perangkat lunak (software) dan keras (hardware) merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk membantu pengolahan data dan informasi tersebut (Fahlevi & Anugrah, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dalam satu dekade terakhir semakin mempercepat transformasi pelayanan publik menuju sistem berbasis digital. Transformasi ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi yang menekankan efisiensi, transparansi, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Peningkatan efisiensi pelayanan publik, validitas data, serta kompetensi teknis perangkat desa dan masyarakat. Waktu pelayanan yang sebelumnya membutuhkan hingga beberapa hari kini dapat diselesaikan dalam waktu 5–20 menit, mencerminkan dampak nyata dari digitalisasi terhadap kualitas layanan publik di desa. Tingginya antusiasme peserta pelatihan dari berbagai unsur masyarakat, ditunjukkan oleh tingkat kehadiran dan keberhasilan penyelesaian pelatihan sebesar 90%, menegaskan bahwa strategi pelibatan multipihak dalam digitalisasi desa adalah pendekatan yang relevan dan efektif. (Linggih Jaelani et al., 2025).

Tata kelola pemerintahan desa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentunya akan mengharuskan kesiapan para perangkat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan e-government (teknologi informasi pemerintahan). Pelayanan kepada masyarakat merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik di pemerintahan desa. Para perangkat desa tentunya dituntut untuk mempersiapkan kemampuannya dalam memberikan pelayanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan. (Nugraha et al., 2023).

Upaya mengatasi permasalahan ini dan seiring pembaharuan sistem, muncul tantangan yang harus dihadapi yaitu meningkatkan taraf pelayanan aplikasi kependudukan dengan menjadi penyedia informasi data yang terintegrasi oleh tingkat pusat. Melaui pemerintah pusat yaitu Ditjen Dukcapil memunculkan inovasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Kemunculan SIAK tertulis dalam Peraturam Menteri Dalam Negeri No.95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk menyatukan data dari berbagai sektor pemerintahan di daerah, termasuk administrasi kependudukan, agar lebih terintegrasi dan mudah diakses oleh berbagai instansi pemerintah. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah melalui Kementerian meluncurkan Dalam Negeri Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK

adalah sistem digital nasional untuk mengintegrasikan data kependudukan dari seluruh daerah ke dalam satu sistem yang. Dengan adanya SIAK, proses administrasi kependudukan dapat menjadi lebih efisien, data kependudukan lebih akurat dan terbarukan secara real-time, guna memastikan pengawasan serta integrasi pusat-daerah berjalan lebih lancar.(Peters, 2023).

Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat pada bidang administrasi kependudukan memberikan solusi berupa sistem informasi manajemen penerimaan pengelolaan permohonan administrasi kependudukan (SIMP3AK). Penggunaan sistem informasi manajemen penerimaan pengelolaan permohonan administrasi kependudukan (SIMP3AK) pada instansi pemerintahan secara khusus memiliki peran penting untuk dapat menyajikan laporan yang bermutu.

Menurut Perarturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dalam lampiran II dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan persyaratan normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sistem informasi manajemen penerimaan pengelolaan permohonan administrasi kependudukan (SIMP3AK) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implemetasi dari beragam peraturan pada aspek pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Efektivitas sistem informasi manajemen penerimaan pengelolaan permohonan administrasi kependudukan (SIMP3AK) merupakan suatu acuan atas kegiatan produksi jasa, pelayanan, dan produktivitas agar mampu lebih maksimal.

METODE

Kegiatan yang terkandung didalamnya seperti input, process, dan ouput dari kegiatan atau kejadian pendaftaran administrasi kependudukan. Komponen pendukung kegiatan ini terdiri atas sistem kerja, sumber data, sumber daya, perangkat keras, perangkat lunak yang akhirnya data dikelola dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat dan berguna untuk pengambilan keputusan. Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pengelolaan Permohonan Administrasi Kependudukan pada dasarnya sistem informasi manajemen penerimaan pengelolaan permohonan administrasi kependudukan merupakan subsitem dari organisasi Administrasi Negara. Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pengelolaan Permohonan Administrasi Kependudukan memiliki peran yang signifikan pada pemerintahan dan pembangunan pelaksana administrasi kependudukan. Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, 2006). Dari satuan pemerintahan yang terkecil seperti desa, kecamatan hingga pada skala nasional, administrasi kependudukan adalah hal yang sangat penting untuk dijalankan. Pengolahan administrasi kependudukan mempunyai peran penting dalam informasi tentang kependudukan bagi pemerintah dalam membuat peraturan serta peningkatan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat untuk dapat mengetahui informasi hasil dari administrasi kependudukan tersebut. (Afandi & Susilo,

2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa sebelum pengembangan website, sistem pelayanan administrasi di Desa Kupang masih bersifat konvensional. Informasi terkait persyaratan administrasi kependudukan belum tersedia secara terdokumentasi dan terpublikasi secara sistematis. Masyarakat harus datang langsung ke kantor desa untuk menanyakan persyaratan dokumen, yang seringkali berujung pada kunjungan berulang akibat ketidaklengkapan berkas.

NIK merupakan salah satu data yang terangkum di SIAK. Penggunaan NIK biasanya digunakan untuk keperluan pengadministrasian pelayanan publik. Masyarakat sebagai pengguna NIK untuk berbagai keperluan pelayanan diatas yang tidak dapat digunakan atau data yang dimunculkan tidak valid menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan keperluan seperti yang telah disebutkan. Hal ini biasanya mengharuskan masyarakat untuk melakukan konsolidasi NIK ke Disdukcapil guna memperbarui data atau meng-update data kependudukannya. Oleh karena itu perlunya update data kependudukan adalah untuk mensinkronasikan data yang telah masuk di SIAK untuk diperbarui kembali dari data lama menjadi data baru apabila ada perubahan domisili atau mengalami data ganda. Dalam hal ini SIAK men- jadi wadah seluruh data kependudukan yang berbasis elektronik yang dikemas dalam bentuk aplikasi. Dalam penerapannya, dibutuhkan adanya elemen yang mendukung suksesnya penerapan SIAK yang menjadi kunci keberhasilan penerapan SIAK. (Laili & Kriswibowo, 2022),

Pemerintahan Desa adalah salah satu , satuan pemerintahan dilevel paling bawah. Pemerintahan Desa dengan sokongan beberapa satuan wilayah terkecil dalam Desa tersebut memiliki lebih dari satu penduduk bahkan hingga jutaan orang penduduk tergantung luas wilayah dan tingkat kelahiran masyarakat dalam desa tersebut. Sehingga dalam rangka memenuhi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, aparatur Desa dengan berbagai upaya harus dapat melakukan inovasi secara tepat, sehingga tujuan kebijakan hukum tersebut tercapai sesuai dengan maksud dan tujuannya. Ketidakmampuan aparatur desa dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi khususnya pemanfaatan Sistem Informasi Desa dan Kependudukan Berbasis Web disebabkan oleh tidak adanya tenaga ahli bidang Teknologi Informasi dan adanya keterbatasan akses pengetahuan hingga pendanaan, meskipun aplikasi Sistem Infomasi Desa dan Kependudukan Berbasis Web tersebut merupakan perangkat lunak yang dapat dimanfaatkan secara bebas (free) oleh pemerintahan desa. Oleh sebab itu, kehadiran para ahli dan praktisi dalam rangka implementasi aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kependudukan Berbasis Web sangat dibutuhkan.(Parwita et al., 2021).

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dikembangkan website resmi Desa Kupang menggunakan platform WordPress. Website ini dirancang sebagai media informasi publik yang memuat Profil desa, Struktur organisasi pemerintahan desa, Berita dan kegiatan

desa, Dokumentasi kegiatan, Informasi persyaratan administrasi pelayanan kependudukan

Fitur informasi persyaratan administrasi menjadi fokus utama pengembangan. Informasi disusun secara terstruktur, sistematis, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Setelah website dikembangkan dan dilakukan sosialisasi kepada perangkat desa serta masyarakat, terlihat adanya perubahan dalam pola akses informasi. Masyarakat mulai memahami bahwa informasi persyaratan administrasi dapat diakses secara mandiri sebelum datang ke kantor desa.

Secara konseptual, kondisi ini menunjukkan peningkatan efisiensi pelayanan karena, 1. Mengurangi kunjungan berulang akibat ketidaklengkapan dokumen, 2. Mengurangi waktu konsultasi manual di kantor desa, 3. Meningkatkan kesiapan masyarakat sebelum mengurus administrasi.

Selain aspek efisiensi, website desa juga berkontribusi pada peningkatan transparansi pemerintahan. Website menjadi media publikasi kegiatan desa, program kerja, serta dokumentasi aktivitas pemerintahan. Sehingga disini perlu adanya digitalisai pengenai pelayanan publik yaitu dengan menerapkan sistem informasi dimana segala aktivitas yang masih berjalan secara manual bisa beralih dengan terkomputerisasi dimana proses birokrasi yang memakan waktu dapat diakses setiap saat dan dimana saja selama jam pelayanan berlangsung demi terciptanya good goverment pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat desa tidak perlu lagi mengantri di Kantor Desa untuk melakukan pelayan publik. Dengan kondisi pada saat ini kebanyakan masyarakat telah memiliki Smartphone sebagai fasilitas penunjang untuk menggakses internet , maka penerapan sistem informasi untuk pelayanan publik secara online diharapkan bisa terlaksana dengan baik dan mejadi solusi untuk kemudahan dalam hal pelayanan. (Rahayu & Marup, 2021).

SIMPULAN

Pengembangan website Desa Kupang merupakan bentuk implementasi digitalisasi pelayanan publik pada level pemerintahan desa yang berorientasi pada penyediaan informasi administrasi secara daring. Berdasarkan hasil kegiatan, permasalahan utama yang ditemukan sebelum implementasi website adalah adanya kesenjangan informasi (information gap) antara aparatur desa dan masyarakat terkait persyaratan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya kunjungan berulang, inefisiensi waktu, serta beban kerja tambahan bagi aparatur desa.

Melalui pengembangan website berbasis WordPress yang memuat informasi persyaratan administrasi secara sistematis dan mudah diakses, terjadi perubahan pola pelayanan. Masyarakat dapat memperoleh informasi secara mandiri sebelum datang ke kantor desa, sehingga meningkatkan kesiapan dokumen dan mengurangi kunjungan berulang. Hal ini

menunjukkan adanya peningkatan efisiensi pelayanan, aksesibilitas informasi, serta transparansi pemerintahan desa.

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi website ini mencerminkan adaptasi institusional terhadap tuntutan reformasi birokrasi dan digital governance. Website Desa Kupang berada pada tahap information stage dalam model e-government, yang merupakan fondasi penting dalam proses transformasi digital pemerintahan desa. Meskipun belum sampai pada tahap layanan administrasi daring terintegrasi, langkah ini telah menjadi instrumen strategis dalam memperkuat prinsip good governance, khususnya transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan pada level desa tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai strategi rasional untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan lokal melalui reduksi kesenjangan informasi dan optimalisasi sistem informasi publik.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, pengembangan Website Desa Kupang perlu terus dilakukan, khususnya dengan menambahkan layanan administrasi daring seperti pengajuan surat secara online dan sistem antrean digital agar manfaat digitalisasi pelayanan desa dapat lebih optimal. Selain itu, perangkat desa perlu mendapatkan pelatihan secara berkala terkait pengelolaan konten website dan literasi digital untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan sistem. Upaya peningkatan literasi digital masyarakat juga perlu dilakukan melalui edukasi berkelanjutan agar masyarakat mampu mengakses dan memanfaatkan informasi serta layanan yang tersedia. Ke depannya, website desa dapat dikembangkan agar terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan nasional, seperti SIAK, sehingga mendukung efisiensi dan validitas data. Untuk kegiatan selanjutnya, penelitian dapat diarahkan pada pengukuran efektivitas digitalisasi pelayanan desa melalui pendekatan kuantitatif maupun evaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan berbasis website..

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, P., & Susilo, G. F. A. (2021). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pengelolaan Permohonan Administrasi Kependudukan (Simp3Ak) Pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Magelang. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi, 12(2), 288–296. https://doi.org/10.22225/kr.12.2.2249.288-296

Fahlevi, M. F., & Anugrah, I. G. (2021). Implementasi Integrasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Dengan Sistem Informasi Laboratorium. Bina Insani ICT Journal, 8(1), 33–42.

Laili, S. N., & Kriswibowo, A. (2022). Elemen Sukses Penerapan Sistem Elements of

Successful Application of. Jurnal Kebijakan Publik, 13(3), 295–301.

Linggih Jaelani, W., Takwim, A., & Hadhiwibowo, A. (2025). Perancangan Sistem Informasi Desa Digital Dalam Mendukung Layanan Administrasi Kependudukan. Jannah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 01(02), 173–179. https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/jannah/article/view/271

Nugraha, F., Diana, D. L. F., Prasetyo Utomo, A., & Wibowo, B. (2023). Implementasi Pengelolaan Dokumen dan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Kedungwaru Kecamatan Karanganyar, Demak. ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 97–104. https://doi.org/10.52072/abdine.v3i1.533

Parwita, W. G. S., Mutiarani, R. A., & Adnyana, I. N. W. (2021). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Desa Dan Kependudukan Berbasis Web Di Desa Kukuh Kerambitan. Jurnal Widya Laksana, 10(1), 27. https://doi.org/10.23887/jwl.v10i1.25886

Peters, B. G. (2023). Good governance. The Elgar Companion to the OECD, 256–265. https://doi.org/10.4337/9781800886872.00033

Rahayu, R. E. G., & Marup, P. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Publik Terpadu Berbasis Web. Jurnal Algoritma, 18(1), 25–34. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.18-1.826.

.